BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Limbah
Edisi : 27 Juni 2008
Halaman : 13

Peserta Pesimistis akan Hasil Bali
Komitmen Indonesia Dipertanyakan

Nusa Dua, Kompas - Konferensi Para Pihak Kesembilan Konvensi Basel di Bali—secara khusus membahas pentingnya kesehatan dan manajemen limbah—yang diagendakan berakhir Jumat (27/6) ini diperkirakan menghasilkan kesepakatan tidak berbeda jauh dari hasil Konvensi Basel 10 tahun lalu.

Pembicaraan dalam berbagai sesi, seperti ekspor-impor limbah dan pendaurulangan limbah kapal, selama empat hari terakhir dinilai tidak menunjukkan hasil maksimal dan dikhawatirkan menemui jalan buntu.

Kesepakatan antara negara berkembang dan negara maju secara terbuka diperkirakan hanya sebagai komitmen di atas kertas, tetapi pada implementasinya posisi kedua pihak tetap.

Presiden COP-9, yang juga Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, di Nusa Dua, Kamis (26/6), mengatakan, ”Kami terus melakukan lobi-lobi di berbagai sesi sebelum konferensi berakhir, antara negara pro dan kontra.”

Negara maju bersikap mendukung ekspor-impor limbah, sedangkan negara berkembang menentangnya. Namun, sejumlah negara Asia, seperti Jepang, Malaysia, dan Singapura, cenderung menyetujui ekspor-impor limbah dengan alasan peluang bisnis. Kalimat bernada pesimistis juga dilontarkan Executive Director of the United Nations Environment Programme Achim Steiner dalam jumpa pers kemarin. Ia membenarkan konferensi ini tak terlalu menghasilkan perkembangan berarti. Namun, ia tetap mengimbau kepada seluruh negara peserta agar tetap menjaga komitmen terhadap persoalan mengatur limbah secara aman.

Pembukaan pertemuan tingkat menteri dihadiri 15 menteri, antara lain Jamaika, Kenya, Nigeria, dan Swedia. Hingga kemarin, dari 170 negara yang terdaftar, hanya 62 negara yang mengirimkan utusan. Puluhan kursi terlihat kosong pada acara pembukaan konferensi tingkat menteri dan peluncuran prangko COP-9.

Tidak konsisten

Indonesia sendiri dianggap tidak konsisten karena di satu sisi gigih memperjuangkan pelarangan ekspor-impor limbah, tetapi di sisi lain Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral dengan Jepang. Kerja sama itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, 20 Agustus 2007—isinya antara lain Indonesia menerima pengiriman barang bekas dari Jepang, antara lain limbah plastik dan limbah radioaktif.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Rachmat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup tak berkomentar panjang saat ditanya komitmen Indonesia pada larangan ekspor-impor limbah. ”Kami akan mengkaji berdasarkan hukum, yakni Undang-Undang Pengolahan Limbah yang berlaku di Indonesia. Ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kami,” ujarnya.

Agus Purnomo, Ketua Delegasi Indonesia, juga staf khusus Departemen Lingkungan Hidup, mengaku terkejut, beberapa jenis limbah dalam kerja sama itu ternyata ada dalam daftar bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menurut dia, pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup tak dilibatkan oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan dalam kerja sama itu.

Dalam pembahasan soal limbah perkapalan, negara Eropa bersikeras soal standardisasi tinggi limbah perkapalan untuk daur ulang atau pengolahannya. Mereka ditentang negara berkembang yang mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pengolahan dan daur ulang kapal. Apakah itu tanggung jawab pemilik kapal, penyewa, atau negara yang menangani.

Eropa kemudian menyerahkan persoalan itu kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO). Forum lalu menyepakati penyusunan standar awal pengolahan limbah perkapalan sambil menunggu keputusan IMO pada pertemuan sama dua tahun mendatang. (AYS)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup